

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 dan Renstra Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan sebagai tolak ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendekripsi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Gorontalo, Januari 2023
Kepala Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo


RISJON SUNGE
NIP. 196909241989021001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
A. Undang-Undang	2
B. Data Geografis Wilayah	2
a. Batas Administrasi Daerah.....	2
b. Luas Wilayah	3
c. Kondisi Topografis	4
C. Gambaran Umum Demografis.....	5
a. Jumlah Penduduk	5
b. Komposisi Penduduk	6
c. Komposisi Penduduk menurut Struktur Usia, Jenis Pekerjaan & Pendidikan	7
D. Jumlah Kabupaten/Kota	10
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah & Pegawai Pemerintah	10
a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	11
F. Alokasi Anggaran dan Realisasi	13
2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	18
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	18
b. Visi dan Misi	21
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	23
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	28
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	39

BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	40
1.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	40
2.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	72
a.	Target Kinerja Dalam Pencapaian Kinerja.....	72
b.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	76
c.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	82
d.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam rPembangunan Jangka Menengah	89
e.	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	89
BAB III	TUGAS PEMBANTUAN	91
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	92
BAB V	PENUTUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Provinsi Gorontalo merupakan daerah atau Provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2001, tertanggal 22 Desember dan menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia. Pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo hanya memiliki dua daerah Kabupaten dan satu daerah Kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dibentuk lagi dua kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan satu Kota.

Sebagai provinsi baru, Provinsi Gorontalo menghadapi sejumlah tantangan antara lain minimnya sumberdaya alam, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam kurun waktu 12 tahun, Gorontalo berhasil membuktikan bahwa kondisi tersebut bukanlah penghalang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ekonomi daerah dan berpengaruh luas bagi masyarakat. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih bukan tanpa kerja keras dan kerja cerdas aparat pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Paling tidak, ditengah minimnya peran swasta dan masyarakat (investasi), pemerintah daerah berusaha memaksimalkan peluang-peluang yang ada, melalui alokasi program, kegiatan dan anggaran, sehingga mampu menjadi daya dorong yang kuat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Narasi ini berupaya untuk menyajikan sebagian dari perjalanan daerah Gorontalo dalam membangun ekonomi, melalui kebijakan pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM), dan Perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Sektor-sektor tersebut sejak awal telah menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo, dan terbukti mampu menjadi lokomotif perekonomian daerah. Dengan visi yang jelas, terukur dan relevan, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama Pemda Kabupaten/Kota mengelola kebijakan publik secara efektif, efisien dan ekonomis, terutama melalui intervensi fiskal daerah terhadap sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.



A. UNDANG-UNDANG

Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

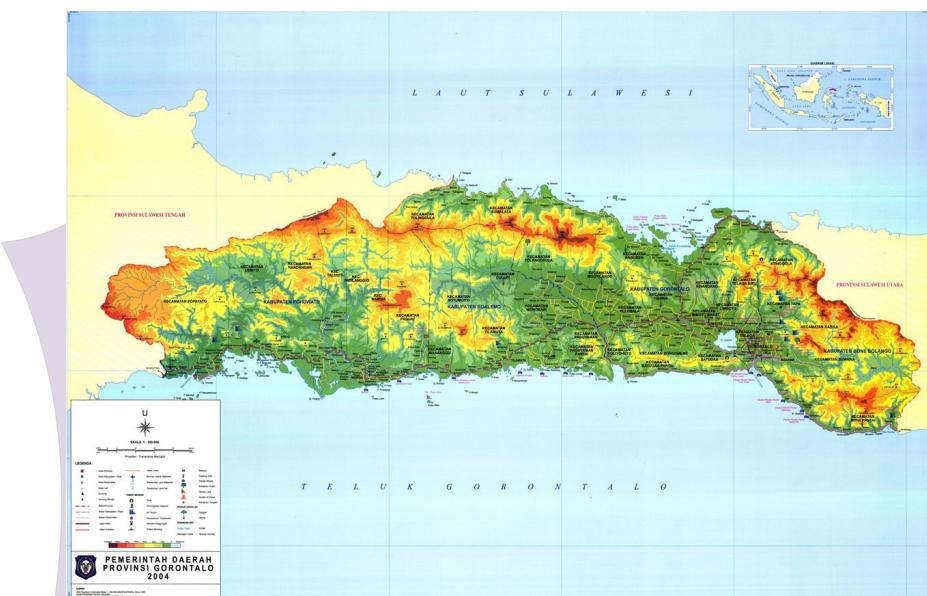
B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Secara administrasi, Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Masing-masing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah administrasi di bawahnya yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Berdasarkan data provinsi dalam angka 2021, Provinsi Gorontalo terdiri dari 77 kecamatan, 734 kelurahan/desa.

a. Batas Administrasi Daerah.

Sesuai koordinat Provinsi Gorontalo terletak di antara $0^{\circ}19'$ – $0^{\circ}57'$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23'$ - $125^{\circ}14'$ Bujur Timur artinya wilayah Provinsi Gorontalo tepat berada di belahan utara Garis Katulistiwa. Letak geografis Provinsi Gorontalo sangat strategis karena wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi moutong) di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan) di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi (Laut ini berhubungan langsung dengan negara-negara Asia Pasific : Filipina, Taiwan, China dan Jepang) dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 1.1 : Peta Provinsi Gorontalo

b. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257 km^2 . Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,59 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah $1.521,88 \text{ km}^2$, Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah $1750,83 \text{ km}^2$, Kabupaten Pohuwato luas wilayah $4244,31 \text{ km}^2$, Kabupaten Bone Bolango luas wilayah $1984,31 \text{ km}^2$, Kabupaten Gorontalo Utara $1676,15 \text{ km}^2$, dan Kota Gorontalo dengan luas wilayah $79,59 \text{ km}^2$.

Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 37,7 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,71 persen.

Tabel 1.1 Luas dan Persentase Wilayah Provinsi Gorontalo

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	(%)*	Sumber Data
1.	Kab. Gorontalo	1750,83	15,55	a. UU No. 29 Thn 1959, b. UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 c. UU No. 11 Thn 2007
2.	Kab. Boalemo	1.521,88	13,52	a. UU No. 50 Thn 1999 b. UU No. 6 Thn 2003
3.	Kabupaten Pohuwato	4.244,31	37,7	UU No. 6 Thn 2003
4.	Kab.Bone Bolango	1.984,31	17,63	UU No. 6 Thn 2003
5.	Kab. Gorontalo Utara	1.676,15	14.89	UU No. 11 Thn 2007
6.	Kota Gorontalo	79,59	0,71	1. UU No. 29 Thn 1959 2. UU No. 22 Thn 1999
Provinsi Gorontalo		11.257,07	100	UU No. 38 Thn 2001

Sumber: BPS. Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

c. Kondisi Topografis

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevansi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevansi bervariasi dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevansi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan ketinggian berbeda-beda dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 1.2. Peta Topografi Provinsi Gorontalo



C. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035 (Pertengahan tahun/Juni, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebanyak 1.180.948 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 persen dari tahun 2020. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,83 dengan jumlah laki-laki sebanyak 595.833 jiwa dan perempuan sebanyak 585.115 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 10-29 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 jiwa.

Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah sebanyak 1.180.948 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2017-2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Gorontalo	374.923	377.050	378.527	393.107	395.635
2	Kab. Boalemo	158.333	162.580	167.024	145.868	147.038
3	Kab. Pohuwato	153.991	157.550	161.373	146.432	147.689
4	Kab. Bone Bolango	157.186	159.190	161.236	162.778	164.277
5	Kab. Gorontalo Utara	112.975	114.040	115.072	124.957	126.521
6	Kota Gorontalo	210.782	215.090	219.399	198.539	199.788
Provinsi Gorontalo		1.133.237	1.150.765	1.202.631	1.171.681	1.180.948

BPS. Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo tahun 2021 memiliki jumlah penduduknya lebih banyak, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo yang yang memiliki luas wilayah 79,59 km² memiliki penduduk yang cukup besar setelah Kabupaten Gorontalo, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk Kota Gorontalo sebesar 2.510 jiwa/km² dan kepadatan terkecil berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 35 jiwa/km². Dengan luas daratan Gorontalo sebesar 11.257,07 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 105 jiwa per kilometer persegi.

b. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.180.948 jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 595.833 jiwa dan perempuan sebanyak 585.115 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 20-44 tahun dengan jumlah 106.495 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan komposisi penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2021

No	Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	49.490	47.629	97.119
2	5 – 9	46.765	45.253	92.018
3	10 – 14	52.711	50.142	102.853
4	15 – 19	54.472	51.910	106.382
5	20 – 24	54.475	52.020	106.495
6	25 – 29	52.517	50.463	102.980
7	30 – 34	48.755	46.973	95.728
8	35 – 39	44.853	43.834	88.687
9	40 – 44	42.348	41.573	83.921
10	45 – 49	38.127	37.620	75.747
11	50 – 54	32.931	33.025	65.956
12	55 – 59	27.171	27.586	54.757

§ 13	60 – 64	20.135	21.091	41.226
14	65 – 69	13.979	15.205	29.184
15	70 – 74	8.947	10.262	19.209
16	75+	8.157	10.529	18.686
Jumlah		595.833	585.115	1.180.948

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

c. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia, Jenis Pekerjaan dan Pendidikan

Pada tahun 2021, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 579.009 jiwa sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 17.959 jiwa.

Tabel 1.5. Proyeksi Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2021

Jenis Kegiatan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
I. Angkatan Kerja	547.766	578.880	585.896	593.973	596.968
1. Bekerja	524.316	555.533	562.087	568.563	579.009
2. Menganggur	23.450	23.347	23.809	25.410	17.959
II. Bukan Angkatan Kerja	297.798	280.721	290.839	299.772	308.393
1. Sekolah	76.421	69.552	73.481	67.189	64.609
2. Mengurus Rumah Tangga	191.902	182.091	184.652	194.191	200.250
3. Lainnya	29.475	29.078	32.706	38.392	43.534
Jumlah/Total	845.564	859.601	876.735	893.745	905.361
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,28%	4,03%		4,28%	3,01%

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan 0,5 persen dibandingkan tahun 2020.

Berikut ini disajikan data penduduk menurut jenis kegiatan utama dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo :

Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Di Provinsi Gorontalo tahun 2021

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
I. Angkatan Kerja	367.746	229.222	596.968
1. Bekerja	356.526	222.483	579.009
2. Penganggur	11.220	6.739	17.959
II. Bukan Angkatan Kerja	82.910	225.483	308.393
1. Sekolah	28.993	35.616	64.609
2. Mengurus Rumah Tangga	25.965	174.285	200.250
3. Lainnya	27.952	15.582	43.534
Jumlah/Total	450.656	454.705	905.361

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

Dari uraian data diatas menyatakan data penduduk yang bekerja berdasarkan jenis kegiatan utama menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki bekerja lebih tinggi daripada jumlah perempuan bekerja. Sementara jumlah pengangguran Laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sama halnya ditahun sebelumnya.

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2017-2021

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	173.899	162.142	172.483	182.369	173.913
Industri	41.673	111.405	89.856	88.473	93.961
Perdagangan	99.170		299.748	297.721	311.135
Jasa Kemasyarakatan	111.233				
Lainnya	98.341	276.986			
Total	524.316	555.533	562.087	568.563	579.009

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

Secara umum, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo 15 tahun keatas yang bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,

transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Di tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan tercatat sebanyak 311.135 jiwa atau 53.74 dari total penduduk yang bekerja.

Ditahun 2021 ada pengalihan pada jenis lapangan kerja utama yang digeluti yaitu dari sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan & Perikanan beralih pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya

Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

Status Pekerjaan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
Berusaha Sendiri	131.695	142.666	1282,94	131.433	143.237
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	76.797	84.275	92.826	98.497	97.883
Berusaha dibantu Buruh Tetap/buruh dibayar	17.633	14.571	20.314	19.469	17.490
Buruh/Karyawan/Pegawai	189.439	200.617	215.521	195.905	200.292
Pekerja Bebas di non pertanian	24.973	31.045	51.721	50.765	53.537
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	23.622	55.505	53.411	72.494	66.570
Jumlah	464.159	555.533	562.087	568.563	579.009

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

Jumlah pencari kerja terbanyak tahun 2021 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Provinsi ini adalah lulusan SMA Umum & Kejuruan sebesar 1946 jiwa,

lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1400 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.9. Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2021

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<= SD	55	16	71
SMP	44	5	49
SMA Umum & Kejuruan	1091	855	1946
Diploma I, II & III	44	95	139
Universitas	511	1063	1574
Jumlah	1745	2034	3779

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

D. JUMLAH KABUPATEN/KOTA

Luas wilayah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019,luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,59 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.521,88 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 1750,83 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4244,31 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,31 km², Kabupaten Gorontalo Utara 1676,15 km², dan Kota Gorontalo dengan luas wilayah 79,59 km².

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Secara umum Sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.10. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2022

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	11	9	20
2	Bidang Koperasi	5	4	9
3	Bidang UMKM	5	7	12
4	Bidang Industri	6	6	12
5	Bidang Perdagangan	7	8	15
6	UPTD BPSMB	5	11	16
JUMLAH		39	45	84

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 54,57% sedangkan pegawai laki-laki 46,43 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di bagian Sekretariat sebanyak 20 orang, kemudian diikuti oleh UPTD BPSMB dan Bidang perdagangan masing-masing 15 Orang.

Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's.

Adapun keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.11. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2022

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	6	3	6	5	20
2	Bidang Koperasi	-	1	-	2	4	2	9
3	Bidang UMKM	-	-	2	1	5	4	12
4	Bidang Industri	-	-	2	2	4	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	1	3	2	7	2	15
6	UPTD BPSMB	-	-	-	2	11	3	16
JUMLAH		-	2	13	12	37	20	84

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S2 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD.

Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 44,05% berpendidikan S1 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 40,23%. Kemudian untuk ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebesar 23,81%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 22,99%. Begitupun halnya dengan ASN yang memiliki pendidikan D1,D2,D3 tahun 2022 sebesar 14,28%, adapun pada tahun 2021 sebesar 13,79%. Untuk jenjang pendidikan SMA ditahun 2022 sebesar 15,48% dan jenjang SMP sebesar 2,38%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan profesional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang SMA ke S1.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi OPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan.

Tabel 1.12. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2022

No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	6	8	6	20
2	Bidang Koperasi	-	1	6	2	9
3	Bidang UMKM	-	1	9	2	12
4	Bidang Perindustrian	-	2	6	4	12
5	Bidang Perdagangan	-	4	9	2	15
6	UPTD BPSMB	-	-	14	2	16
TOTAL		-	14	52	18	84

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 16,67% golongan II, 61,90% golongan III dan 21,43 % golongan IV.

Tabel 1.13. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2022

No	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1	Sekretariat	I	I	2	1	15	20
2	Bidang Koperasi	-	1	-	3	5	9
3	Bidang UMKM	-	1	-	3	8	12
4	Bidang Perindustrian	-	1	-	3	8	12
5	Bidang Perdagangan	-	1	-	3	11	15
6	UPTD BPSMB	-	1	3	7	5	16
TOTAL		1	6	5	20	52	84

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,190%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,14 % dan pejabat eselon IV berjumlah 5 orang atau 5,95%. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 20 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penambahan jumlah pejabat fungsional di tahun 2022 karena adanya penyetaraan jabatan dari struktur Esselon IV ke pejabat fungsional.

F. ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Gorontalo TA. 2022 bahwa Total APBD Provinsi Gorontalo TA. 2022 adalah sebesar Rp. 2.122.278.456.084,-, realisasi Rp. 1.932.079.774.810,20-

Total alokasi anggaran pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp. 38.167.659.012,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.173.738.155,- Total anggaran ini dari sumber dana APBD dan DID. Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut:

1. Pagu dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan TA. 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu dan realisasi Dinas Kumperindag TA. 2022 (sumber dana APBD)

✚ *Pagu Tahun Anggaran 2022*

▪ **Belanja Operasi : Rp. 25.327.273.004**



~ Belanja Pegawai : Rp. 9.525.980.406
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 15.801.292.598

▪ **Belanja Modal** : **Rp. 2.986.716.134**

⊕ *Realisasi Anggaran :*

▪ **Belanja Operasi** : **Rp. 24.743.256.062**
~ Belanja Pegawai : Rp. 9.210.213.660
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 15.533.042.402

▪ **Belanja Modal** : **Rp. 2.980.049.829**

Anggaran Dinas Kumperindag TA. 2022 (sumber dana DID Periode 1 & periode 2)

⊕ *Anggaran Tahun 2022*

▪ **Belanja Operasi** : **Rp. 8.658.962.000**
~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 8.658.962.000

▪ **Belanja Modal** : **Rp. 1.194.707.874**

⊕ *Realisasi Anggaran :*

▪ **Belanja Operasi** : **Rp. 7.963.143.004**
~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 7.963.143.004

▪ **Belanja Modal** : **Rp. 487.289.260,-**

Sehingga total anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 melalui sumber dana APBD dan DID :

⊕ *Pagu Tahun Anggaran 2022*

▪ **Belanja Operasi** : **Rp. 33.986.235.004**
~ Belanja Pegawai : Rp. 9.525.980.406
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 24.460.254.598

▪ **Belanja Modal** : **Rp. 4.181.424.008**

⊕ *Realisasi Anggaran :*

▪ **Belanja Operasi** : **Rp. 32.706.399.066**
~ Belanja Pegawai : Rp. 9.210.213.660
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 23.496.185.406

▪ **Belanja Modal** : **Rp. 3.467.339.089**

2. Pagu dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan TA. 2022 per urusan , dengan rincian sebagai berikut :

a. **Alokasi dan Realisasi Anggaran (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar)**



Alokasi Anggaran total untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2022

Rp. 23.229.565.427,- dengan rincian :

Pagu dan realisasi (sumber dana APBD)

 *Pagu Tahun Anggaran 2022*

- **Belanja Operasi** : Rp.18.648.141.419,-

~ Belanja Pegawai : Rp. 9.525.980.406,-
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 9.122.161.013,-

- **Belanja Modal** : Rp. 2.986.716.134,-

 *Realisasi Anggaran :*

- **Belanja Operasi** : Rp.18.161.172.005,-

~ Belanja Pegawai : Rp. 9.210.213.660,-
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 8.950.958.345,-

- **Belanja Modal** : Rp. 2.980.049.829

Pagu Dinas Kumperindag TA. 2022 (sumber dana DID Periode 1 & periode 2)

 *Pagu Tahun Anggaran 2022*

- **Belanja Operasi** : Rp. 400.000.000

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 400.000.000

- **Belanja Modal** : Rp. 1.194.707.874

 *Realisasi Anggaran :*

- **Belanja Operasi** : Rp. 399.872.500

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 399.872.500

- **Belanja Modal** : Rp. 487.289.260

Total Anggaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2022 :

 *Pagu Tahun Anggaran 2022*

- **Belanja Operasi** : Rp.19.048.141.419,-

~ Belanja Pegawai : Rp. 9.525.980.406
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 9.522.161.013

- **Belanja Modal** : Rp. 4.181.424.008

 *Realisasi Anggaran :*

- **Belanja Operasi** : Rp. 18.561.044.505,-

~ Belanja Pegawai : Rp. 9.210.213.660
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 9.350.830.845

- **Belanja Modal** : Rp. 3.467.339.089,-



b. Alokasi dan Realisasi Anggaran (Urusan pilihan)

Alokasi Anggaran Total Dinas Kumperindag Tahun 2022 pada urusan pilihan Rp. 11.022.150.109,- dengan rincian :

Alokasi Anggaran dan realisasi pada Urusan Perdagangan :

Pagu dan realisasi (sumber dana APBD)

⊕ *Pagu Tahun Anggaran 2022*

▪ **Belanja Operasi : Rp. 4.028.400.109**

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 4.028.400.109

▪ **Belanja Modal : Rp. -**

⊕ *Realisasi Anggaran :*

▪ **Belanja Operasi : Rp. 3.986.518.541**

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 3.986.518.541

▪ **Belanja Modal : Rp. -**

Pagu Dinas Kumperindag TA. 2022 (sumber dana DID Periode 1 & periode 2)

⊕ *Pagu Tahun Anggaran 2022*

▪ **Belanja Operasi : Rp. 6.993.750.000**

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 6.993.750.000

▪ **Belanja Modal : Rp. -**

⊕ *Realisasi Anggaran :*

▪ **Belanja Operasi : Rp. 6.470.753.661**

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 6.470.753.661

▪ **Belanja Modal : Rp. -**

Total Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2022 :

⊕ *Pagu Tahun Anggaran 2022*

▪ **Belanja Operasi : Rp. 11.022.150.109**

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 11.022.150.109

▪ **Belanja Modal : Rp. -**

⊕ *Realisasi Anggaran :*

▪ **Belanja Operasi : Rp. 10.457.272.202**

~ Belanja Pegawai : Rp. -



- ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 10.457.272.202
- **Belanja Modal** : Rp. -

Alokasi Anggaran dan realiasasi pada Urusan Perindustrian

Pagu dan realisasi (sumber dana APBD)

Pagu Tahun Anggaran 2022

- **Belanja Operasi** : Rp. 2.650.731.476

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 2.650.731.476

- **Belanja Modal** : Rp. -

Realisasi Anggaran :

- **Belanja Operasi** : Rp. 2.595.565.516

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 2.595.565.516

- **Belanja Modal** : Rp. -

Pagu Dinas Kumperindag TA. 2022 (sumber dana DID Periode 1 & periode 2)

Pagu Tahun Anggaran 2022

- **Belanja Operasi** : Rp. 1.265.212.000

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 1.265.212.000

- **Belanja Modal** : Rp. -

Realisasi Anggaran :

- **Belanja Operasi** : Rp. 1.092.516.843

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 1.092.516.843

- **Belanja Modal** : Rp. -

Total Anggaran Urusan Industri Tahun 2022 :

Pagu Tahun Anggaran 2022

- **Belanja Operasi** : Rp. 3.915.943.476

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 3.915.943.476

- **Belanja Modal** : Rp. -

Realisasi Anggaran :

- **Belanja Operasi** : Rp. 3.688.082.359

~ Belanja Pegawai : Rp. -
~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 3.688.082.359

- **Belanja Modal** : Rp. -



2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindusrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 tahun 2017. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindusrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk mendukung Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam RPJMD yaitu “Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran”.

Renstra Dinas Koperasi UKM Perindusrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan arahan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindusrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo guna mencapai sasaran-sasaran strategis di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/kota, para pelaku usaha serta masyarakat agar keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia dapat digunakan secara optimal.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Koperasi UKM Perindusrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo berharap seluruh target program dan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Perindusrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat direncanakan, diimplementasikan, dikendalikan dan dikontrol untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan semoga Allah swt meridhai segala upaya yang dilakukan dan memudahkan semua urusan dalam mewujudkan Gorontalo Unggul, Maju dan Sejahtera pada tahun 2022.

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD



a. Tujuan

1. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UKM
2. Peningkatan Peran IKM dalam Perekonomian Daerah
3. Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan

b. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kumperindag Tahun 2017 – 2022 meliputi :

1. Meningkatnya Koperasi Sehat
2. Meningkatnya koperasi yang menjalin kemitraan
3. Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas
4. Meningkatnya Pertumbuhan IKM
5. Meningkatnya Penyerapan Tengah Kerja IKM
6. Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri
7. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perluasan usaha Koperasi dan UKM sebagai berikut :

• Bidang Koperasi dan UMKM

Tabel 1.14. Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM

Strategi	Kebijakan
1. Mendorong koperasi aktif untuk melaksanakan RAT melalui penguatan kelembagaan, usaha dan permodalan serta memfasilitasi kerjasama koperasi dengan lembaga usaha lainnya	Penguatan Kelembagaan, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi melalui peningkatan SDM
2. Peningkatan jaringan kerjasama dan Penguatan Manajemen Usaha Pelaku UKM	1. Pengembangan Kerjasama UKM dan Informasi serta Pengembangan Pemasaran Hasil Produk UKM. 2. Pengembangan Wirausaha Mikro untuk Naik Kelas

• Bidang Perindustrian

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah adalah sebagai berikut :



Tabel 1.15. Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian

Strategi	Kebijakan
Mendorong Peran IKM dalam Perekonomian Daerah melalui Jumlah usaha IKM yang di bentuk dan di fasilitasi menjadi industri yang mampu dan mandiri	Pengembangan industri kecil menengah melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha

- **Bidang Perdagangan**

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta akses pasar luar negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 1.16. Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan

Strategi	Kebijakan
Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan komoditi eksport dan penciptaan iklim usaha antar pulau serta pengawasan perbatasan dan hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan iklim usaha hubungan yang sehat antar pelaku usaha dan konsumen serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok 2. Menyelenggarakan perlindungan konsumen yang sinergis, harmonis dan terintegrasi terhadap komoditi eksport unggulan yang efektif lintas daerah, lintas sektor dan lintas pelaku usaha

- **Bidang Pelayanan SKPD**

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik SKPD sebagai berikut :

Tabel 1.17. Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan SKPD

Strategi	Kebijakan

Mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan serta percepatan reformasi birokrasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan public	Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan publik dengan mengoptimalkan sumberdaya SKPD melalui penataan manajemen organisasi, sarana prasarana, kualitas perencanaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan serta koordinasi yang efektif lintas pusat, lintas daerah, lintas sektor dan lintas pelaku
--	--

b. Visi dan Misi

Visi adalah “*Mewujudkan Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul, dan Sejahtera*”.

Gorontalo Maju dan Unggul, adalah kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul yang dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan diukur dengan meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

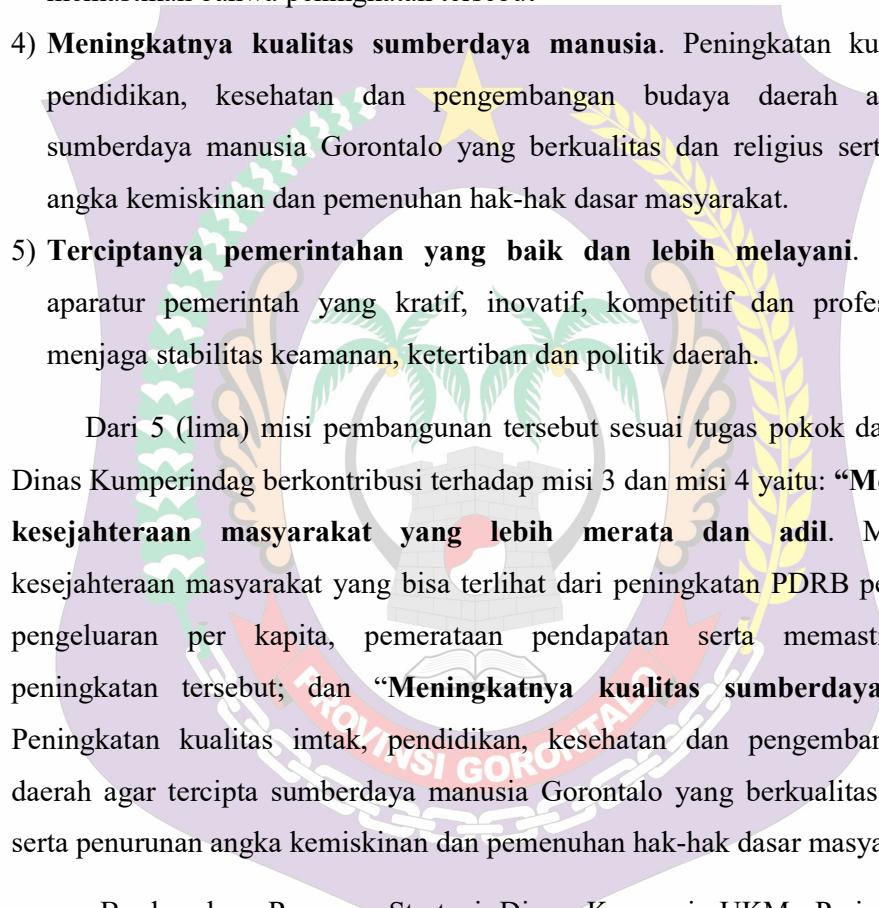
Gorontalo Sejahtera yaitu 1) kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran dan 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Penjabaran atas visi ini dirumuskan dalam 5 (lima) misi. Yaitu :

➊ Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.** Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.

- 
- 2) **Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah.** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
 - 3) **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut
 - 4) **Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.** Peningkatan kualitas imtak, pendidikan, kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
 - 5) **Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani.** Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Dari 5 (lima) misi pembangunan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kumperindag berkontribusi terhadap misi 3 dan misi 4 yaitu: “**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut; dan “**Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia**”, Peningkatan kualitas imtak, pendidikan, kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”.

Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah :



1. Mendorong Pertumbuhan dan Perluasan Usaha Koperasi dan UKM
2. Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa serta Akses Pasar Dalam dan Luar Negeri
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik SKPD

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Adapun visi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”**. Adalah Untuk mendukung Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2017-2022 , dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program perencanaan dan pembangunan industri
8. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
9. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
10. Program pengembangan eksport
11. Program standarisasi dan perlindungan konsumen

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome dari program ini adalah persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan pelaporan.

Pada program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Anggaran yang mendukung pelaksanaan program ini adalah pada pagu awal berjumlah Rp. 15.974.062.973,-, APBD-P sejumlah Rp. 469.511.678,- dan tambahan anggaran melalui DID periode 2 sejumlah Rp. 1.194.707.874,-. Sehingga total anggaran sebesar Rp. 17.606.181.924,- dengan reaalisasi fisik 95,97 persen dan keuangan 93,46 persen

2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi berkualitas, jumlah koperasi berprestasi..

Ditahun 2022 Jumlah koperasi aktif mencapai 985 koperasi aktif dari target 728 koperasi dan Jumlah Koperasi berprestasi berjumlah 20 Koperasi dari target 10 koperasi.

Dukungan anggaran tahun 2022 untuk pelaksanaan program kegiatan ini berjumlah Rp. 2.625.870.358,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.588.426.886,- atau 98,57 persen realisasi keuangan dan 100 persen realisasi fisik. Pada program ini terdapat 2 (dua) sumber dana yaitu APBD dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp.2.452.964.000,-

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat

Pagu untuk kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 331.539.238,- dengan realisasi sebesar Rp. 330.865.850,-. Dengan silva sebesar Rp. 673.388,- (sisa pada item belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- dan belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat, perjalanan dinas biasa dan dalam kota)

Outcome dari program ini adalah jumlah dokumen laporan hasil pengawasan 7 dokumen, jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk dan dilatih sebanyak 1 satgas (provinsi), jumlah koperasi berkualitas/koperasi berprestasi 20 koperasi.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha berjumlah

Rp. 404.017.104,- dengan realisasi hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp. 403.682.324,- Silvia kegiatan berjumlah Rp. 334.780,- yaitu item belanja yang yang tidak dapat dibelanjakan lagi yaitu sisa belanja ATK, bahan cetak, alat listrik, makan minum rapat, makan minum aktivitas lapangan serta sisa perjalanan dinas dalam kota Rp. 287.500,-. Adapun realisasi Fisik dari kegiatan 100 persen dan realisasi keuangan sebesar 99,92 persen

Outcome Jumlah koperasi & UKM yang mengakses permodalan sebanyak 1500 koperasi

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Outcome program adalah jumlah UKM yang dibina/naik kelas dengan mencapai realisasi fisik 100 persen dan realisasi keuangan 98,50 persen

Pagu anggaran 2022 pada program ini berjumlah Rp. 318.627.570,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2022 berjumlah Rp. 315.048.665,- dan silvia sebesar Rp. 3.578.905,- (berupa sisa belanja atk, bahan cetak, honorarium narasumber yang tidak dapat direalisasikan) adapun untuk capaian kinerja Realisasi Fisik 100 persen dan Realisasi keuangan mencapai 98,88 persen dari target 100 persen.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pagu awal untuk program ini berjumlah Rp. 1.220.927.275,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu gedung ruang produksi factory sharing yang semula penganggarannya terdapat di program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi direvisi ke program pengembangan UKM

dengan alasan yaitu gedung ruang produksi (factory sharing) merupakan bantuan/belanja yang akan diserahkan ke masyarakat produksi ini akan dikelola oleh desa dan akan menjadi tempat produksi bersama para pelaku UKM serta menjadi galeri promosi UKM dan tidak menjadi aset dinas. Di tahun 2022 Program ini mendapat tambahan APBD-P sebesar Rp. 222.401.958,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang diperuntukkan untuk keikutsertaan pada pelaksanaan G-20 Bali Summit, verifikasi penerima manfaat UKM/IKM serta tambahan honor untuk tenaga pelayanan umum sehingga total anggaran program ini yang bersumber dari DAU 2022 berjumlah Rp. 1.543.329.23,- kemudian, tambahan melakukan sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) Yang diperuntukkan untuk bantuan ekonomi produktif bagi UMKM di Provinsi Gorontalo. Untuk DID periode 1 ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2021 Sehingga total anggaran program ini tahun 2022 sebesar Rp. 1.943.329.233,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Dengan capaian kinerja fisik 100 persen dan realisasi keuangan 99,64 persen dari target 100 persen.

Outcome dari program adalah jumlah UKM yang dibina/naik kelas sebanyak 75 UKM naik kelas tahun 2022

7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Outcome dari program ini adalah jumlah IKM yang dibina dengan target renja 200 IKM dan target Renstra 15.339 IKM

Alokasi Anggaran awal Sebesar Rp. 1.962.877.828,- tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 532.508.206,- melalui sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 1.100.000.042,- dan melalui DID periode 2 sebesar Rp. 165.212.000,-. Sehingga total anggaran tahun 2022 untuk program ini sebesar Rp. 3.760.598.076,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.535.773.259,- (94,02 persen keuangan)

8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Outcome dari program ini adalah data informasi IKM.

Pagu sub kegiatan sejumlah Rp. 155.345.400,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 152.309.100,- dan realisasi keuangan sebesar 98,05 persen dan realisasi fisik 100 persen.

9. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Outcome dari program ini adalah jumlah perdagangan antar pulau dengan target 3600 kali dan capaian 4033 kali (*Realisasi perdagangan antar pulau merupakan nilai akumulasi capaian tahun 2021 yaitu sebanyak 3808 kali ditambahkan dengan jumlah perdagangan antar pulau posisi sampai November 2022 sebanyak 225 kali*)

Alokasi Anggaran induk sebesar Rp. 1.183.962.239,- tambahan anggaran pada APBD-P sebesar rp. 595.860,- dan melalui sumber dana DID Periode 1 sebesar Rp. 4.500.000.000,0 dan DID Periode 2 sebesar Rp. 2.493.750.000,- sehingga total anggaran yang mendukung pelaksanaan program ini sebesar Rp. 8.773.572.239,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.234.091.658,- (93,85 persen). Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan engendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

10. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Anggaran yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan ini berjumlah Rp. 284.130.413,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 271.011.547,- (95,38 persen keuangan, dan 98,59 persen fisik).

Outcome dari program adalah Jumlah eksport dengan target sebanyak 12 komoditi dan capaian 11 komoditi atau 91,66 persen.

11. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Outcome dari program adalah Jumlah sertifikasi mutu barang dengan target 3 sertifikat dan capaian 12 sertifikat

Alokasi Anggaran awal Sebesar Rp. 1.771.204.350,- tambahan APBD-P sebesar Rp. 2200.743.107,- sehingga total anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.964.447.457,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.952.168.997,- (99,37 persen keuangan dan 100 persen realisasi fisik). Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan program yang terdapat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai

bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, DAK, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).



Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2022 dan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2022
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2022	
			Lokasi Kab/ Kota Kec/Kel/ Desa	Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Catatan Penting
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.469.806.366		-
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17.469.806.366		-
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan		100 %	14.938.796.679		100 % -
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan		100 %	1.049.181.853		100 % -
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor/SKPD/Pusat	8 Dokumen	1.049.181.853		8 Dokumen	
2.17.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD	7 Dokumen			7 Dokumen	
		Percentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan	100 %	9.673.730.28		100 %	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJMD 2022	
			Lokasi Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa	Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Catatan Penting
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan						
2.17.01.1.02.03	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai Pelaksanaan			12 Bulan	9,523,730,282		12 Bulan
2.17.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan			2 Dokumen	150.000.001		2 Dokumen
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan			100 %	219,723,922		100 % -
2.17.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang di latih			20 ASN	219,723,922		135 ASN
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan			100 %	2.635.731.323		100 % -
2.17.01.1.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana SKPD			100 %	2.635.731.323		100 %
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan			100 %	1.360.429.298		100 % -
		Persentase pelayanan jasa administrasi kantor			100 %	1.207.175.469		100 %

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJMD 2022				
			Lokasi Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa	Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuh an Pagu Indikatif
2.17.03	PROGRAM PENGAWAAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pelayanan Jasa Administarsi Kantor UPTD BPSMB			100 %	153.253.829			100 %	
2.17.03.1.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi Berprestasi percontohan KSP/USP	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan berprestasi & koperasi percontohan	7 Dokumen	10 Koperasi	306.821.326		27 Dokumen	10 Koperasi Berprestasi	-
2.17.03.1.01.01	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih KSP/USP	Jumlah satgas pengawas berprestasi & koperasi percontohan	1 Tim Satgas	10 Koperasi	305.021.677		1 Tim Satgas	30 Koperasi	-
2.17.05	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi	Jumlah Koperasi Aktif & Jumlah Koperasi berprestasi		1 Tim Satgas	10 Koperasi	178.127.110		728 Koperasi Aktif	728 Koperasi Aktif	-
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi	Jumlah Koperasi Aktif		728 koperasi aktif	178.186.611			10 koperasi Berprestasi	10 koperasi Berprestasi	-
					690 pengurus , pengawas,					-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Reneka Tahun 2022				Cataran Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
			Lokasi	Kab/Kota	Kec/Kel/Desa	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		
2.17.05.1.01.01	Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Berprestasi			10 Koperasi Berprestasi			pengelola & masyarakat yang dilatih	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasi dan Kompetensi Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan			150 pengurus, pengawas, pengelola koperasi	178.186.611		690 pengurus, pengawas, pengelola koperasi	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Revitalisasi Koperasi			10 Koperasi			30 Koperasi	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan			1.500 KUKM	466.851.104		5000 KUKM	-
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan			1.500 KUKM	466.851.104		5000 KUKM	-
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang dibina/Naik Kelas			50 UKM	359.776.710		250 UKM	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJMD 2022				
			Lokasi Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa	Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan an Pagu Indikatif
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Pengukuran Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran			200 UKM	359.776.710			850 UKM	-
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran			200 UKM	359.776.710			850 UKM	-
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang dibina			50 UKM	1.219.373.936			250 UKM	-
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dibina			50 UKM	1.219.373.936			250 UKM	-
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	- Jumlah UMKM yang dibina - Jumlah KUKM yang difasilitasi oleh Konsultan Plut			50 UKM				250 UKM	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/dipasarkan di dalam & luar daerah			100 UKM	1.219.373.936			400 UKM	-
					20 Produk UKM/IKM				80 Produk UKM/IKM	
						6.131.971.142				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJMD 2022			
			Lokasi Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa	Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuh an Pagu Indikatif
3.30	PILIHAN						3.514.463.939		-	-
3.30.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Perdagangan Antar Pulau			3600 Kali				3600 Kali	
		Jumlah Operasi Pasar			150 Kali Operasi Pasar		1,190.681.311		150 Kali Operasi Pasar	-
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Operasi Pasar			150 Kali Operasi Pasar		949.576.120		150 Kali Operasi Pasar	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar			150 Kali Operasi Pasar		949.576.120		150 Kali Operasi Pasar	-
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi			17 Kali		241.105.191			
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk			17 Kali		241.105.191			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJMD 2022	
			Lokasi Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa	Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Catatan Penting
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraaan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Ekspor Jumlah Ekspor			12 Komoditi	284.130.413		12 Komoditi
3.30.05.1.01					12 Komoditi	284.130.413		12 Komoditi
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Komoditi Produk Ekspor yang dipromosikan Jumlah UKM yang memahami prosedur eksport Misi dagang eksport dan antar pulau			10 Komoditi	284.130.413		10 Komoditi
					20 calon eksportir			20 calon eksportir
					1 misi dagang			1 misi dagang
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Sertifikat Mutu Barang			3 Sertifikat	2.039.652.215		15 Sertifikat
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen			80 Kasus	952.512.491		80 Kasus
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen			80 Kasus	952.512.491		80 Kasus
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Mutu Barang			3 Sertifikat	969.208.005		15 Sertifikat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJMD 2022			
			Lokasi Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa	Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan an Pagu Indikatif
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang			1200 kali	695.274.499			3500 kali	
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang			30 Pelaku Usaha	273.933..506			123 Pelaku Usaha	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Mutu Barang			3 Sertifikat	117.931.719			15 Sertifikat	-
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diawasasi			120 Pelaku Usaha	117.931.719			120 Pelaku Usaha	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.617.507.203				
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang Dibina			15.339 IKM	2.462.161.803			15.339 IKM	-
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang Dibina			15.339 IKM	2.462.161.803			15.339 IKM	-
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Industri Agro Terpadu			1 Industri Agro Terpadu	449.052.183			1 Industri Agro Terpadu	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Peaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan			50 IKM	759.458.452			140 IKM	

Kode	Bidang Urusan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJMD 2022	
			Lokasi Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa	Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Catatan Penting
3.3.1.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Kimia Sandang Aneka dan Kerajinan Yang di Bina Penguasaan Teknologi			70 IKM Kimia kerajinan sandang & aneka yang dibina	950.953.429		240 IKM Kimia kerajinan sandang & aneka yang dibina
3.3.1.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan Teknologi			20 IKM Logam, Mesin dan elektronik yang dibina	302.697.739		120 IKM Logam, Mesin dan elektronik yang dibina
3.3.1.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data Informasi IKM			1 Sistem Informasi IKM	155.345.400		1 Sistem Informasi IKM -
3.3.1.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data Informasi IKM			1 Sistem Informasi IKM	155.345.400		1 Sistem Informasi IKM -
3.3.1.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data Informasi IKM			1 Sistem Informasi IKM	155.345.400		1 Sistem Informasi IKM -
		JUMLAH				23.601.777.508		-

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo hanya termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar (tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar)



BAB II

1. CAPAIAN KINERJA PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

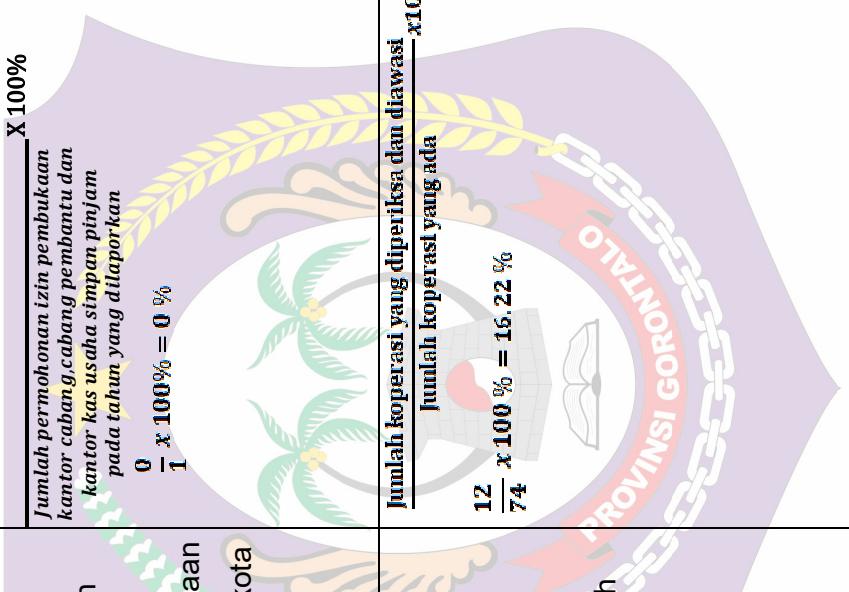
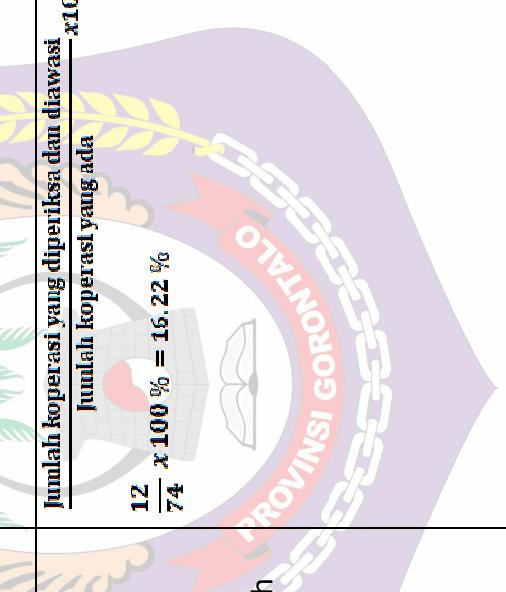
I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

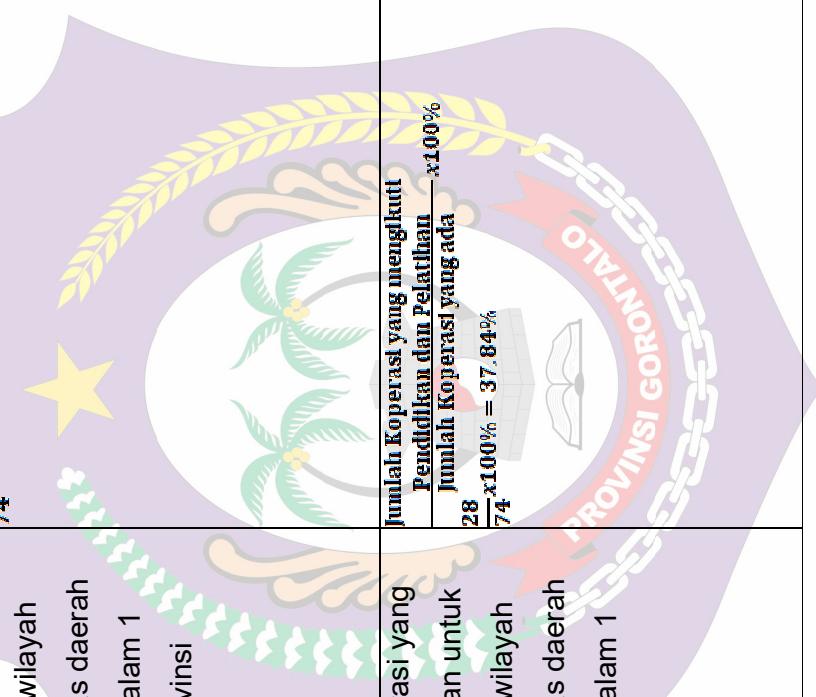
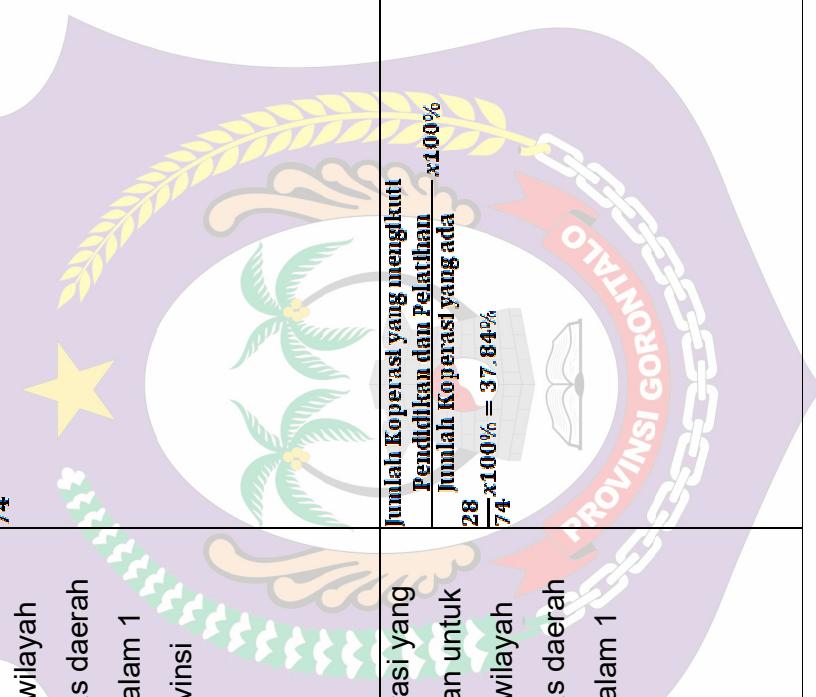
1) IKK Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

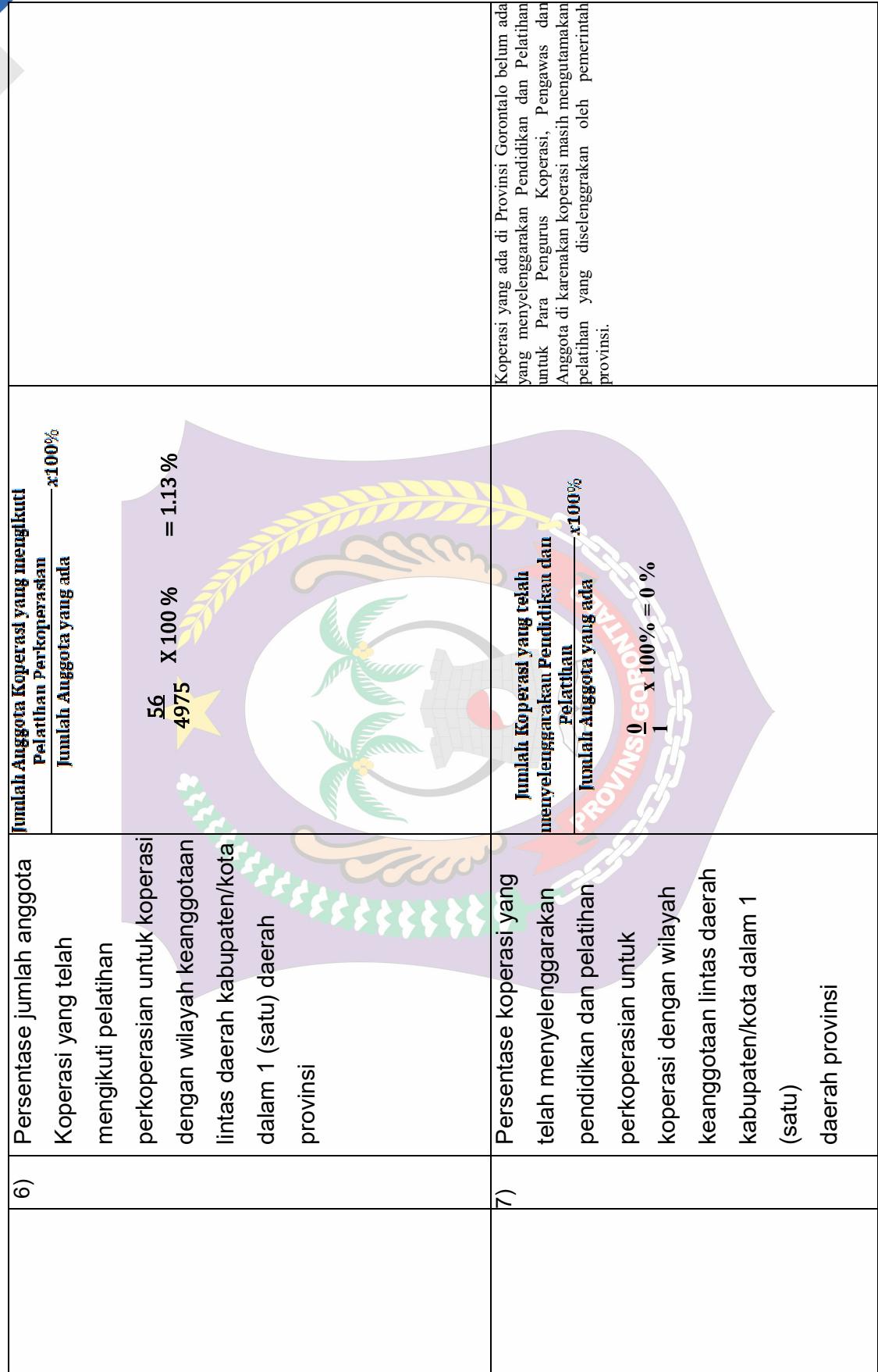
- Penjelasan IKK outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT. volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$
		$\frac{252}{1414} \times 100\% = 17,82\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">■ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	Penjelasan IKK Output	Rumus	Keterangan
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$ PROVINSI 2 OR X 100 % = 74 2,70%	<p><i>Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</i></p> <p><i>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam</i></p>

2)	Percentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<p>Jumlah penerbitan izin pembukaan Kantor cabang, cabang pembantu dan tatus yang dilaporkan</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$ 	<ol style="list-style-type: none"> Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dengan terbitnya PP No. 5 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dinas Koperindag hanya menerbitkan surat rekomendasi Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi yang di terbitkan oleh Kementerian Hukum danHAM
3)	Percentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<p>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasai</p> $\frac{12}{74} \times 100\% = 16.22\%$ 	Pemeriksaan, Pengawasan dan Penilaian Koperasi dilaksanakan bersamaan

4)	<p>Percentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dimiliki kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> 	<p>Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Wilai Kesehatanya Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Ada $\times 100\%$</p> $\frac{12}{74} \times 100\% = 16.22\%$
5)	<p>Percentase koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> 	<p>Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan dan Pelatihan Jumlah Koperasi yang ada $\times 100\%$</p> $\frac{28}{74} \times 100\% = 37.84\%$

		
6)	Percentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<p>Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian Jumlah Anggota yang ada $\times 100\%$</p> <p>56 4975 X 100 % = 1.13 %</p>
7)	Percentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<p>Jumlah Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Anggota yang ada $\times 100\%$</p> <p>PROVINSI GORONTALO 0 1 X 100% = 0 %</p> <p>Koperasi yang ada di Provinsi Gorontalo belum ada yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan untuk Para Pengurus Koperasi, Pengawas dan Anggota di karenakan koperasi masih mengutamakan pelatihan yang diselenggrakan oleh pemerintah provinsi.</p>

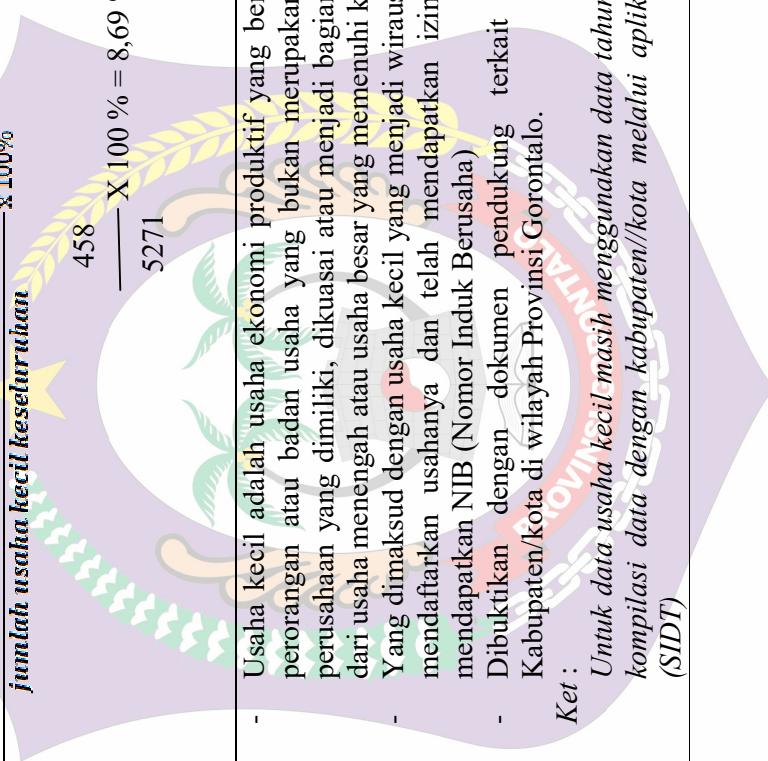
	<p>8) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p><i>Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya</i> x 100%</p> <p>$\frac{15}{74} \times 100\% = 20,27\%$</p>	<p>Sertifikat NIK yang dari Kementerian di serahkan langsung kepada Koperasi yang bersangkutan dan Dinas hanya dapat melihat melalui http://nik.depkop.go.id/</p>
9)	<p>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p><i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</i> x 100%</p> <p>$\frac{3}{74} \times 100\% = 4,05\%$</p>	<p><i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</i> x 100%</p> <p>$\frac{3}{74} \times 100\% = 4,05\%$</p>

10)	<p>Percentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p><i>Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran</i> $\times 100\%$ $\frac{3}{74} \times 100\% = 4,05\%$</p>
11)	<p>Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p><i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i> $\times 100\%$ $\frac{10}{74} \text{ Koperasi} \times 100\% = 13,51\%$</p>

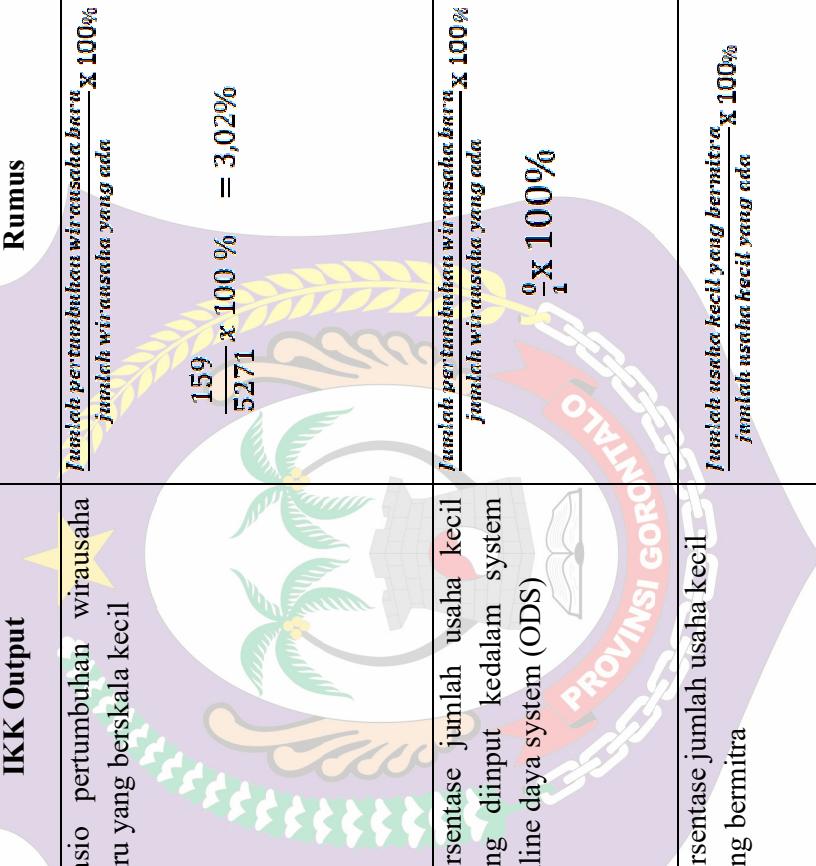
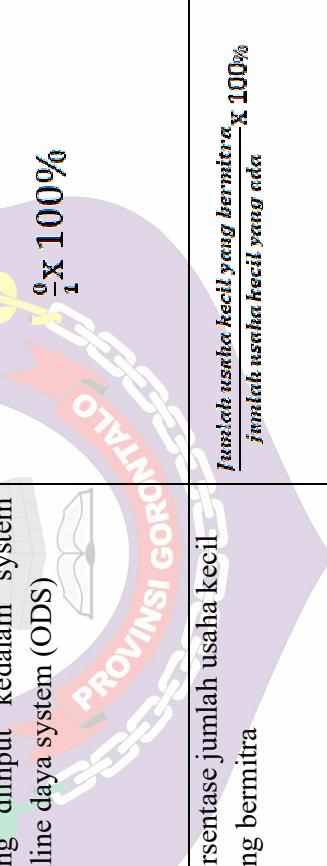
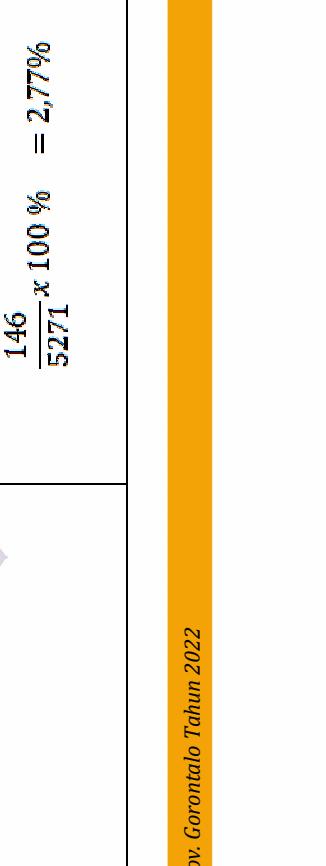
12)	<p>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{5 \text{ Koperasi}}{74 \text{ Koperasi}} \times 100 \% = 6,76 \%$</p>

2) IKK Outcome : Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$  $\frac{458}{5271} \times 100\% = 8,69\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. - Yang dimaksud dengan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah mendapatkan izin usaha mikro dan kecil (IUM) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang tersebar di Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo. <p><i>Ket :</i></p> <p><i>Untuk data usaha kecil masih menggunakan data tahun 2020 dikarenakan masih dalam proses kompliasi data dengan kabupaten//kota melalui aplikasi sistem Informasi data Terintegrasi (SIDT)</i></p>

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	<p>1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil</p>  $\frac{159}{5271} \times 100\% = 3,02\%$	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	Data Pertumbuhan wirausaha baru adalah data akumulasi dari tahun sebelumnya
	<p>2) Persentase jumlah usaha kecil yang diinput kedalam system online daya system (ODS)</p>  $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	Belum optimalnya Aplikasi Online Data Sistem oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI
	<p>3) Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra</p>  $\frac{146}{5271} \times 100\% = 2,77\%$	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang bermitra}}{\text{jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	Facilitasi Coaching Business dan fasilitasi mitra Ollego (Ole-Ole Gorontalo dan Ponuwa Mart)

4)	Percentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<p><i>Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i></p> $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$ $\frac{231}{1227} \times 100 \% = 18,83\%$
5)	Percentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dan IT	<p><i>Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran</i></p> $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$ $\frac{104}{1123} \times 100 \% = 9,26\%$
6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<p><i>Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</i></p> $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}}{\text{Jumlah usaha kecil yang tidak ada}} \times 100\%$ $\frac{608}{5271} \times 100 \% = 11,53\%$
7)	Percentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	<p><i>Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i></p> $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang tidak ada}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$ $\frac{830}{5271} \times 100 \% = 15,75\%$

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Provinsi

1) IKK Outcome : Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi

Penjelasan IKK Outcome																	
Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di Provinsi																
Rumus	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun } n - \text{jumlah industri besar tahun } n-1}{\text{jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$																
	$\frac{25 - 21}{21} \times 100$																
	= 38,10%																
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Investasi</th> <th><1.000.000.000</th> <th>1.000.000.000 - 15.000.000.000</th> <th>>15.000.000.000</th> </tr> <tr> <th>Tenaga Kerja</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-19 orang</td> <td>Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</td> <td>Industri menengah</td> <td>Industri menengah</td> </tr> <tr> <td>>= 20 orang</td> <td>Industri menengah</td> <td>Industri besar</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	Nilai Investasi	<1.000.000.000	1.000.000.000 - 15.000.000.000	>15.000.000.000	Tenaga Kerja				1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah	>= 20 orang	Industri menengah	Industri besar	
Nilai Investasi	<1.000.000.000	1.000.000.000 - 15.000.000.000	>15.000.000.000														
Tenaga Kerja																	
1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah														
>= 20 orang	Industri menengah	Industri besar															

2) IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP

- Penjelasan IKK Outcome	
Konsep/Definisi	: Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP
Rumus	: <p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$</p> <p>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p>
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait <p><i>Penjelasan :</i> Tahapan Penyusunan RPIP telah selesai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 Nomor 9 Tahun 2022 dengan nomor registrasi dari Kemendagri : 9-320/2022 yang akan dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda. (100%)</p>

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Percentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP	1) Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP 100% Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (15%) e) Penetapan Perda RPIP (10%)	Tahapan Penyelesaian RPIP telah selesai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 Nomor 9 Tahun 2022 dengan nomor registrasi dari Kemendagri : 9-320/2022 yang akan dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda. (100%)

3) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Ket
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permonakan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	

4) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Ket
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPU) bagi industri besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	Untuk tahun 2022 tidak Ada Industri yang mengajukan IPU

- 5) IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome	
Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Ket
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri(IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan atau pengajuan izin yang masuk}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Provinsi Gorontalo belum mempunyai kawasan industri

6) IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

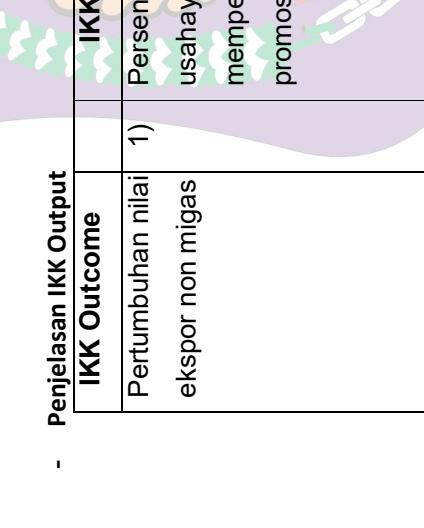
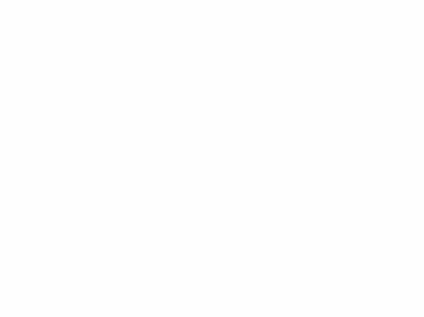
Penjelasan IKK Outcome																			
Konsep/Definisi	: Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini																		
Rumus	: <table border="1"> <tr> <td>1)</td><td>Keterkinian informasi industri :</td></tr> <tr> <td>-</td><td>Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)</td></tr> <tr> <td>-</td><td>Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</td></tr> <tr> <td>-</td><td>Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>Kelengkapan informasi industri meliputi :</td></tr> <tr> <td>-</td><td>Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</td></tr> <tr> <td>-</td><td>Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</td></tr> <tr> <td></td><td>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</td></tr> <tr> <td></td><td>$50 + 20 \% = 70 \%$</td></tr> </table>	1)	Keterkinian informasi industri :	-	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	-	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	-	Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	2)	Kelengkapan informasi industri meliputi :	-	Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	-	Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)		Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		$50 + 20 \% = 70 \%$
1)	Keterkinian informasi industri :																		
-	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)																		
-	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)																		
-	Tidak menyampaikan informasi industri (0%)																		
2)	Kelengkapan informasi industri meliputi :																		
-	Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)																		
-	Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)																		
	Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)																		
	$50 + 20 \% = 70 \%$																		
Keterangan	: <ul style="list-style-type: none"> ■ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 																		
Penjelasan IKK Output																			
IKK Outcome	IKK Output																		
Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	<p>1) Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan Lintas Kalimantan Gorontalo yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industry besar dan perusahaan kawasan industry lintas kab/kota</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0 \%$																		
	<p><i>Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan kawasan industri Lintas Kalimantan Gorontalo</i></p> <p><i>Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan kawasan industri lintas Kabupaten/Kota</i></p> <p><i>x 100%</i></p>																		
	<p>Provinsi Gorontalo belum mempunyai kawasan industri</p>																		

III. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Provinsi

1) IKK Outcome : Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas

- Penjelasan IKK Outcome

Penjelasan IKK Outcome	
Konsep/Definisi	Mengukur pertumbuhan nilai eksport non migas
Rumus	$\frac{\text{Nilai eksport non migas tahun berjalan} - \text{Nilai eksport non migas tahun sebelumnya}}{\text{Nilai eksport non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{44,893,492,67 \text{ USD} - 20,123,200,00 \text{ USD}}{20,123,200,00 \text{ USD}} \times 100 \% = 123,09 \%$
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Penjelasan IKK Output		IKK Output	Rumus	Keterangan
Pertumbuhan nilai eksport non migas	1)	Persentase pelaku usahayang memperoleh fasilitas promosi dagang 	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang}} \times 100\%$ $\frac{2}{8} \times 100 \% = 25 \%$	
	2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas Pengembangan produk 	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang}} \times 100\%$ $\frac{6}{8} \times 100 \% = 75 \%$	

			Untuk Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat anggaran untuk kegiatan pelatihan
3)	Percentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}{Jumlah pelaku usaha yang memiliki fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor} \times 100\%$	Untuk Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat anggaran untuk kegiatan pelatihan
4)	Percentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	$\frac{Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru}{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor} \times 100\%$	Untuk Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat anggaran untuk kegiatan pelatihan akan tetapi ada pelaku usaha yang menjadi Eksportir Baru

2) IKK Outcome : Persentase penanganan pengaduan konsumen

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :	Mengukur tingkat penanganan pengaduan konsumen
Rumus :	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan}} \times 100\%$
Keterangan :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluq hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ▪ Yang dimaksud dengan pengaduan konsumen adalah pengaduan konsumen yang diterima oleh Perangkat Daerah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cakupan perhitungan adalah pengaduan konsumen yang ditangani, baik yang masih berproses maupun yang sudah selesai pada tahun pelaporan ▪ Pengaduan konsumen yang diterima pada tahun sebelumnya dan masih berproses atau selesai pada tahun pelaporan tidak termasuk dalam perhitungan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output	PROVINSI GORONTALO	Rumus	Keterangan
Persentase penanganan pengaduan konsumen	1) Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Jumlah total pengaduan	konsumen yang ditangani oleh Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan :	91 Pengaduan

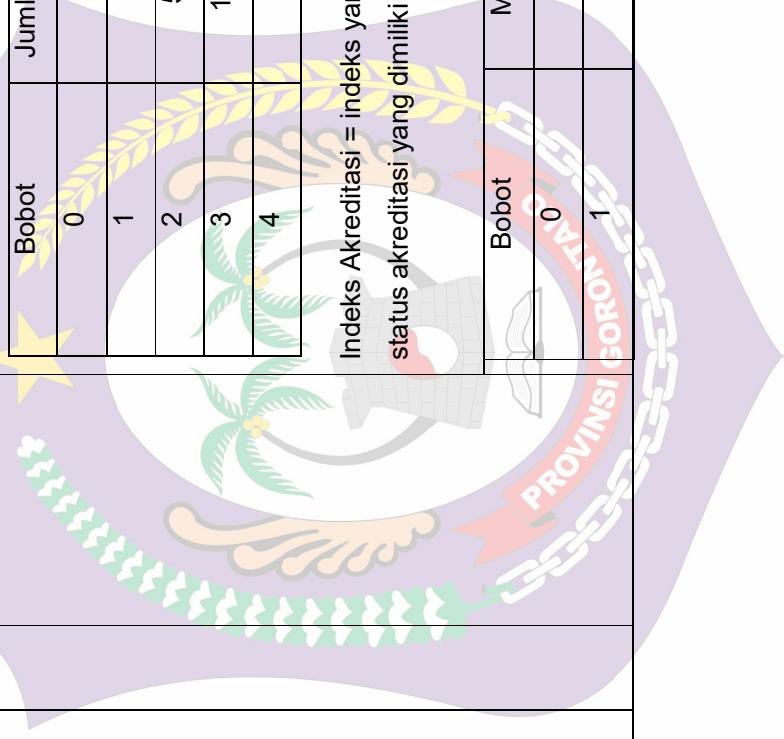
	2) Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	Jumlah total konsumen yang mengikuti kegiatan edukasi konsumen dan jumlah pelaku usaha yang dibina oleh pemerintah daerah	Untuk kegiatan pelaksanaan edukasi konsumen tidak dilaksanakan karena tidak ada ketersediaan anggaran
		0 Pelaku Usaha	

3) IKK Outcome : Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang dinilai dalam satu tahun}} \times 100\%$ $\frac{4}{311} \times 100 \% = 1,29 \%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan komoditi potensial merujuk kepada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 164 Tahun 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu (23 Komoditi) (biji Kakao dan Kopi) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Penjelasan IKK Output		IKK Output	Rumus	Ket
Percentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Jumlah komoditi potensial yang dipantau 1 Komoditi	Untuk bukti laporan hasil pengujian di rasiakan tidak bias di sebarluaskan
	2)	Indeks Kinerja BPSMB	Indeks Kinerja BPSMB = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi $\text{Indeks Kinerja BPSMB} = 3 + 1 + 1 = 5$ Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah pengujian mutu barang dalam BPSMB	



Indeks Contoh Uji = Indeks yang mewakili jumlah contoh uji yang diuji oleh BPSMB tersebut dalam 1 tahun	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bobot</th><th>Jumlah Contoh Uji</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td><150</td></tr> <tr> <td>1</td><td>150-500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>501-1000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1001-2500</td></tr> <tr> <td>4</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Bobot	Jumlah Contoh Uji	0	<150	1	150-500	2	501-1000	3	1001-2500	4	
Bobot	Jumlah Contoh Uji												
0	<150												
1	150-500												
2	501-1000												
3	1001-2500												
4													
	<p>Indeks Akreditasi = indeks yang mewakili status akreditasi yang dimiliki BPSMB tersebut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bobot</th><th>Masa Akreditasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>Mati</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Hidup</td></tr> </tbody> </table>	Bobot	Masa Akreditasi	0	Mati	1	Hidup						
Bobot	Masa Akreditasi												
0	Mati												
1	Hidup												

4) IKK Outcome : Tertib Usaha
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat tertib usaha pelaku usaha MB TBB
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$ $= 0 \%$
Keterangan	<p><i>Penjelasan :</i></p> <p>Provinsi Gorontalo belum memiliki TBB karena aktivitas layanan transportasi untuk umum baik via Udara (Bandara) maupun via Laut (Pelabuhan) belum terhubung secara langsung dengan jalur internasional, sehingga tidak menguntungkan ditinjau dari segi profit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan minuman beralkohol (MB) adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi ▪ Yang dimaksud dengan Toko Bebas Bea (TBB) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu ▪ Yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol ▪ Daerah yang tidak memiliki Toko Bebas Bea dapat menyertakan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Ket
Tertib Usaha	<p>1) Persentase Toko Bebas Bea (TBB) yang diterbitkan</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	$\frac{\text{Jumlah SIUP MB TBB yang terbit} \leq 5 \text{ Hari Kerja}}{\text{Jumlah Permohonan SIUP MB TBB}} \times 100\%$	<p>Provinsi Gorontalo belum memiliki layanan transportasi untuk umum baik via Udara (Bandara) maupun via Laut (Pelabuhan) belum terhubung secara langsung dengan jalur internasional, sehingga tidak menguntungkan ditinjau dari segi profit</p>
	<p>2) Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	$\frac{\text{Jumlah Rekomendas SIUP MB bagi Distributor yang terbit} \leq 5 \text{ Hari Kerja}}{\text{Jumlah Permohonan Rekomendasi SIUP MB bagi Distributor}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi SIUP dibutuhkan bagi distributor yang akan mengajukan izin/perpanjangan izin untuk MB Golongan B dan C (Sesuai dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2014, pasal 22 ayat 2, point C) Provinsi Gorontalo memiliki 2(dua) distributor MB untuk Golongan A, dan dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2014, pasal 22, ayat 3, yang berbunyi ; permohonan SIUP MB untuk distributor minuman beralkohol golongan A dikecualikan dari persyaratan Rekomendasi Gubernur

		Tidak ada permohonan SIUP B2 dalam kurun waktu tahun 2021
3)	Percentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	<p><i>Jumlah SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer yang diterbitkan ≤ Sharikeraia</i></p> <p><i>Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer</i></p> <p>$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$</p> <p>Bahan Berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun atau toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan irritasi</p>
4)	Percentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	<p>Penerbitan SIUP MB Golongan B dan C dilaksanakan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p><i>Jumlah SIUP Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat yang terbit≤ Sharikeraia</i></p> <p><i>Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat</i></p> <p>$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$</p> <p>PROVINSI GORONTALO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Yang dimaksud dengan MB Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 5%-20% ■ Yang dimaksud dengan MB Golongan C adalah minimal beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 20- 55%

	5) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit \leq 1 hari kerja (1 x 24 jam)}}{\text{Jumlah penontonan penyerahan SKA yang dokumenternya telah diinformasi dengan lengkap dan Benar}} \times 100$	$\frac{1}{25} \times 100 \% = 4 \%$
--	---	---	-------------------------------------

5) IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\% = \dots\%$ $\frac{76.558,73}{264.307,70} \times 100\%$ $= 91,12\%$

Penjelasan

Kewenangan Bidang Perdagangan ada di pengawasan distribusi pupuk, khusus lini 3 dan 4.

1. Dinas pertanian menghitung kebutuhan pupuk subsidi di tiap kab/kota untuk diusulkan menjadi RDKK di tahun berikutnya, RDKK direkab berdasarkan usulan dari kelompok tani, dan yang mempunyai punya data kelompok tani yang terdaftar di RDKK hanya Dinas Pertanian Provinsi
2. Sesuai dengan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/3/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Bidang Perdagangan hanya bagian mengawasi distribusi mulai lini 3 sd 4 dan biasanya hanya sampai pada pengecer, nanti apabila ada laporan dari kelompok tani terhadap pengecer dan distributor Bidang Perdagangan akan memberikan tidak sebatas rekomendasi peringatan, pembekuan, atau pencabutan izin.

Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
------------	--

Penjelasan IKK Output		IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kinerja realisasipupuk	1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	92,12 %	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ $X = \frac{76.558,73}{237.876,03 \times 264.307,70} \times 100\%$ $= 0,00013221$	<p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan</p> <p>a = Jumlah pupuk yang disalurkan</p> <p>b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari PROVINSI GORONTALO)</p> <p>c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>

6) IKK Outcome: Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Penjelasan IKK Outcome	
Konsep/Definisi	: Mengukur persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\%$ $= \frac{10}{41} \times 100\% = 24,39\%$
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup pengawasan barang beredar meliputi 7 parameter yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Standar - Label dalam Bahasa Indonesia - Petunjuk penggunaan - Jaminan layanan purnajual - Cara menjual - Pengiklanan - Klausulabaku I GORONTALO - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Penjelasan IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Percentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	1)	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jumlah barang beredar yang diawasi oleh Dinas yang menangani urusan perdagangan	Minta laporan Hasil Pengawasan/Dokumentasi/Sampling

41 Jenis Barang

7) IKK Outcome : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

Penjelasan IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		
Rumus	:		$KVpt = \frac{\sum_{t=1}^{12} S_t}{P} \times 100\%$ $KVpt = \frac{S_N}{P} \times 100\%$ $\frac{2.354}{35.573} \times 100\% = 0.55\%$	$KVpt$ = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu S_N = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember

- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Penjelasan IKK Output				
IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	
Percentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok	<p>1) Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi</p> <p>a. Tersedianya bangunan pusat distribusi</p> <p>b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola badan usaha pengelola pusat distribusi</p> <p>c. Beroperasinya pusat industri</p> <p>d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani</p>	$K = (a+b+c+d) \times 100\%$ <p>K = Pusat Distribusi a = tersedianya bangunan Pusat Distribusi b = telah ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi c = Beroperasinya Pusat Distribusi d = Menguasai 20% dari pangsa pasar pada komoditas yang ditangani</p> $\frac{0}{1} \times 100 \% = 0 \%$	Belum terdapat adanya Pusat Distribusi di Provinsi Gorontalo	

			Sumber data dari Dinas Provinsi Gorontalo
2)	Percentase koefisien variasi harga antar waktu	Percentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok $KV_{pt} = \frac{SN}{P} \times 100\%$ $\frac{2.354}{35.573} \times 100\%$ $= 0.55\%$	
3)	Percentase laporan harga harian melalui sistem informasi hargaKemendag	Percentase laporan harga harian yang disampaikan melalui sistem informasi harga Kementerian Perdagangan $= 100\%$	



2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Target Kinerja Dalam Pencapaian Kinerja

Adapun Target Kinerja dalam perjanjian kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022
Meningkatnya Koperasi Sehat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	- Jumlah Koperasi Aktif	728
		- Jumlah Koperasi berkualitas	10
		- Jumlah Koperasi berprestasi	10
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	150
		Jumlah Revitalisasi Koperasi	10
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7
		Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1
		Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10
		Jumlah pemeriksaan KSP/USP	10
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7
		Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1
		Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022	
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas		Jumlah pemeriksaan KSP/USP	10	Koperasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan	1.500	KUKM
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan	-	kali
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan	1.500	KUKM
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan		kali
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang dibina/naik kelas	50	UKM
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran	200	UKM
			0	UKM Yang Dimagangkan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang dibina/Naik Kelas	50	UKM
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dibina	50	UKM
		Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/ dipasarkan di dalam & luar daerah	20	produk UKM/IKM
Meningkatnya Koperasi Sehat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan layanan jasa administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur	100	%
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Adminsitrasii Perkantoran Dinas Kumperindag	100	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana SKPD	100	%

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022	
Meningkatnya Perdagangan dalam Negeri	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang dilatih	20	ASN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi lintas sektor/SKPD/Pusat	8	Dokumen
		Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD	7	Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	2	Dokumen
Meningkatnya Perdagangan dalam Negeri	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Perdagangan antar Pulau	3.600	kali
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	150	kali Operasi Pasar
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	17	kali
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	3	Sertifikat
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	120	Pelaku Usaha
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen	80	Kasus
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Standar Mutu Barang	Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang	1200	Kali

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022	
	Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang	30	Pelaku Usaha
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Ekspor	10	Komoditi
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Misi dagang ekspor dan antar pulau	1	Misi Dagang
		Jumlah Komoditi Produk Eksport yang dipromosikan	10	Komoditi
		Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor	20	Calon Eksportir
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang di bina	200	IKM
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan	50	IKM yang mendapat Bimtek/Bantuan Pengolahan Pangan
		Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi	70	IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina
		Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan Teknologi	20	IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina
		Jumlah Industri Agro Terpadu	1	Industri Agro Terpadu
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Data Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

- ♦ Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar (Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah)

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Diskumperindag Tahun 2022

Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	- Jumlah Koperasi Aktif	728	Koperasi	985	Kop	135,30
	- Jumlah Koperasi berkualitas	10	Koperasi	20	Kop	200
	- Jumlah Koperasi berprestasi	10	Koperasi	20	Kop	200
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	150	pengurus dan pengelola yang dilatih	390	pengurus dan pengelola yang dilatih	260
	Jumlah Revitalisasi Koperasi	10	Koperasi	7	Kop	70
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7	Dokumen	12	Dok	171,43
	Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1	satgas (provinsi)	1	satgas (provinsi)	100
	Jumlah koperasi berprestasi & koperasi	10	koperasi	20	Kop	200

Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
	percontohan					
	Jumlah pemeriksaan KSP/USP	10	Koperasi	12	Kop	120
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7	Dokumen	12	Dok	171,43
	Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1	satgas (provinsi)	1	satgas (provin si)	100
	Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10	Koperasi	20	Kop	200
	Jumlah pemeriksaan KSP/USP	10	Koperasi	12	Kop	120
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan	1.500	KUKM	4.867	KUKM	324,47
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan	-	kali	6	kali	
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan	1.500	KUKM	4.867	KUKM	324,47
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan		kali	6	kali	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang dibina/naik kelas	50	UKM	75	UKM	150
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan,	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen,	200	UKM	67	UKM	33,50
		0	UKM Yang Dimagangk an	-	UKM Yang Dimag	

Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	pengelolaan, produktivitas dan pemasaran				angkan	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang dibina/Naik Kelas	50	UKM	75	UKM	150
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dibina	50	UKM	75	UKM	150
	Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/ dipasarkan di dalam & luar daerah	20	produk UKM/IKM	35	produk UKM/ IKM	175
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan layanan jasa administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur	100	%	100	%	100
	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	100	%	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Adminsitrasi Perkantoran Dinas Kumperindag	100	%	100	%	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana SKPD	100	%	86,27	%	86,27
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang dilatih	20	ASN	26	ASN	130
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi lintas sektor/SKPD/Pusat	8	Dokumen	8	Dok	100

Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD	7	Dokumen	7	Dok	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	2	Dokumen	1	Dok	50

♦ Urusan Pilihan (Bidang Perdagangan)

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Urusan Pilihan (Perdagangan) Diskumperindag Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Perdagangan antar Pulau	3.600	kali	4033	kali	112,03
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	150	kali Operasi Pasar	33	kali Operasi Pasar	22
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	17	kali	10	kali	58,82
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	3	Sertifikat	12	Sertifikat	400
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	120	Pelaku Usaha	120	Pelaku Usaha	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
beredar dan/atau jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen						
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen	80	Kasus	91	Kasus	113,75
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang	1200	Kali	1.051	Kali	87,58
	Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang	30	Pelaku Usaha	51	Pelaku Usaha	170
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Ekspor	10	Komoditi	11	Komoditi	110
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Misi dagang ekspor dan antar pulau	1	Misi Dagang	1	Misi Dagang	100
	Jumlah Komoditi Produk Ekspor yang dipromosikan	10	Komoditi	14	Komoditi	140
	Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor	20	Calon Eksportir	-	Calon Eksportir	-

♦ Urusan Pilihan (Bidang Industri)

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Urusan Pilihan (Industri)
Diskumperindag Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang dibina	15339	IKM	15767	IKM	102,79
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan	50	IKM yang mendapat Bimtek/Bantuan Pengolahan Pangan	68	IKM yang mendapat Bimtek/ Bantuan Pengolahan Pangan	136
	Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi	70	IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	97	IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	138,57
	Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan Teknologi	20	IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	47	IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	235
	Jumlah Industri Agro Terpadu	1	Industri Agro Terpadu	-	Industri Agro Terpadu	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM	-	IKM	-
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Data Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM	100

c. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar (Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah)

Tabel 2.5. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2021 dan TA. 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2021	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi Capaian Kinerja 2022	Persentase (%)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	- Jumlah Koperasi Aktif	708	Koperasi	957	Koperasi	135,17	728
	- Jumlah Koperasi berkualitas	10	Koperasi	10	Koperasi	100	10
	- Jumlah Koperasi berprestasi	10	Koperasi	10	Koperasi	100	10
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Peikoperasian Bagi Koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	150	pengurus dan pengelola yang dilatih	390	pengurus dan pengelola yang dilatih	260	150
	Jumlah Revitalisasi Koperasi	10	Koperasi	5,00	Koperasi	50	10
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7	dokumen	7	dokumen	100	7
	Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1	satgas (provinsi)	1	satgas (provinsi)	100	1
	Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10	koperasi	10	koperasi	100	10
	Jumlah pemeriksaan KSP/USP	10	Koperasi	10	Koperasi	100	12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2021		Realisasi Capaian Kinerja 2021	Percentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022	Percentase (%)
		Target Perjanjian Kinerja 2021	Realisasi Capaian Kinerja 2021			Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi Capaian Kinerja 2022		
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7	dokumen	7	100	7	dokumen	12	Dok 171,43
	Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1	satgas (provinsi)	1	100	1	satgas (provinsi)	1	satgas (provinsi) 100
	Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10	koperasi	10	100	10	koperasi	20	koperasi 200
	Jumlah pemeriksaan KSP/UJP	10	Koperasi	10	Koperasi	100	Koperasi	12	Koperasi 120
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan	1250	KUKM	1.250	KUKM	100	1.500	KUKM	4.867 324,47
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan	12	Kali	6	Kali	50	-	Kali	6 kali
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan	150	1250	1.250	KUKM	833	1.500	KUKM	4.867 KUKM 324,47
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan	12	kali	6	kali	50		kali	6 kali
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang dibina/naik kelas	50	UKM	75	UKM	150	50	UKM	75 UKM 150

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2021	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi Capaian Kinerja 2022	Persentase (%)
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Penitinan, Pengujian Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran	150	UKM 75	UKM 50	UKM 200	UKM 67	UKM 33,50
	6	UKM Yang Dimagangkan -	UKM Yang Dimagangkan -	0	UKM Yang Dimagangkan	-	UKM Yang Dimagangkan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang dibina/Naik Kelas	50	UKM 75	UKM 150,00	UKM 50	UKM 75	UKM 150
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Merjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dibina	50	UKM 75	UKM 150	UKM 50	UKM 75	UKM 150
	Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/ dipasarkan di dalam & luar daerah	20	produk UKM/IKM 20	produk UKM/IKM 100	produk UKM/IKM 20	produk UKM/IKM 35	produk UKM/IKM 175
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase peningkatan layanan jasa administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Percentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2021	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi Capaian Kinerja 2022	Persentase (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase ketersediaan sarana dan Prasarana SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	86,27 %	86,27 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang di latih	20 ASN	126 ASN	630	20 ASN	26 ASN	130
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi lintas sektor/SKPD/Pusat	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	100
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen	50	2 Dokumen	1 Dokumen	50

2. Urusan Pilihan (Bidang Industri)

Tabel 2.6. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2021 dan TA. 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2021	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi Capaian Kinerja 2022	Persentase (%)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang dibina	15139 IKM	15393 IKM	101,68	15339 IKM	15767 IKM	102,79

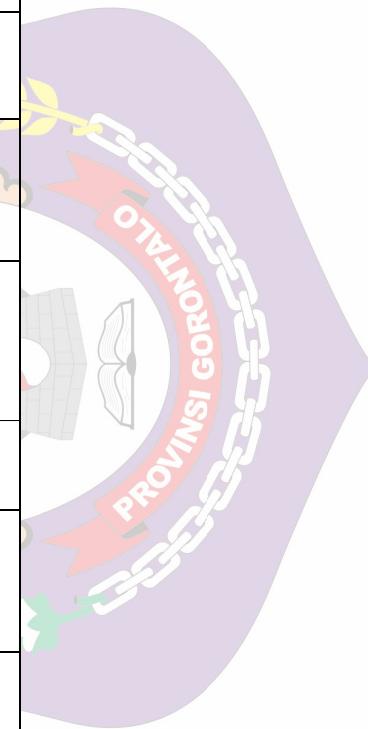
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2021	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi Capaian Kinerja 2022	Persentase (%)
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan	60	IKM yang mendapat Bimtek/ Bantuan Pengolahan Pangan	199	IKM yang mendapat Bimtek/ Bantuan Pengolahan Pangan	332	136
	Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Pengusahaan Teknologi	60	IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	86	IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	143	139
	Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan Elektronik yang dibina eletronik yang dibina Pengusahaan Teknologi	30	IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	44	IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	147	235
	Jumlah Industri Agro Terpadu	1	Industri Agro Terpadu	1	Industri Agro Terpadu	100	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data Informasi IKM	1	IKM	0	IKM	1	IKM
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPKI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Data Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM	0	Sistem Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM

3. Urusan Pilihan (Bidang Perdagangan)

Tabel 2.7. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2021 dan TA. 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2021	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi Capaian Kinerja 2022	Persentase (%)		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Perdagangan antar Pulau	3360	kali	3.808	kali	113,33	3.600 kali	4033 kali	112,03
Kegiatan Merjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	17	kali Operasi Pasar	25	kali Operasi Pasar	150	kali Operasi Pasar	33 kali Operasi Pasar	22
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi				17 kali	10	kali	58,82	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	3	Sertifikat	-	Sertifikat	3	Sertifikat	12 Sertifikat	400
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	110	Pelaku Usaha	125	Pelaku Usaha	114	Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	100
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen	60	Kasus	96	Kasus	160	80 Kasus	91 Kasus	113,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2021	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Target Perjanjian Kinerja 2022	Realisasi Capaian Kinerja 2022	Persentase (%)	Persentase (%)
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang	950	Kali	692	Kali	73	1200
	Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang	30	Pelaku Usaha	30	Pelaku Usaha	100	30
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Ekspor	10	Komoditi	100,00	10	Komoditi	11
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Eksport Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Misi dagang ekspor dan antar pulau	-	Misi Dagang	-	Misi Dagang	-	Misi Dagang
	Jumlah Komoditi Produk Eksport yang dipromosikan	9	Komoditi	3	Komoditi	33	10
	Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor	20	Calon Eksportir	30	Calon Eksportir	150	20
						Calon Eksportir	-
						Calon Eksportir	-



d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kumperindag Tahun 2022 Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 – 2022

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Koperasi Aktif	678 Kop	866 Kop	693 Kop	907 Kop	708 Kop	957 Kop	728 Kop	985 Kop
	Jumlah Koperasi Berprestasi	10 Kop	6 Kop	10 Kop	- Kop	10 Kop	10 Kop	10 Kop	20 Kop
2	Jumlah UKM yang dibina/naik kelas	50 UKM	70 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	75 UKM	50 UKM	75 UKM
3	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah perdagangan antar pulau	2880 kali	3308 kali	3120 kali	3553 kali	3360 kali	3808 kali*	3600 kali	4033 kali
5	Jumlah eksport	8 Komoditi	8 Komoditi	9 Komoditi	13 Komoditi	10 Komoditi	10 Komoditi	10 Komoditi	11 Komoditi
6	Jumlah sertifikasi mutu barang	3 sertifikat	- sertifikat	3 sertifikat	8 sertifikat	3 Sertifikat	- Sertifikat	3 Sertifikat	12 Sertifikat
7	Jumlah IKM yang dibina	14.739 IKM	15.000 IKM	14.939 IKM	15.226 IKM	15.139 IKM	15.555 IKM	15.339 IKM	15.767 IKM

e. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
8. Program pengembangan ekspor
9. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
10. Program perencanaan dan pembangunan industri
11. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional





BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota tidak menerima anggaran pembangunan untuk Tugas Pembantuan.





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo belum termasuk didalam standar pelayanan minimal.



BAB V

PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun disamping untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007, juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami yakin dan percaya dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat menciptakan *check and balances* antara seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo utamanya masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun disamping untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007, juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami yakin dan percaya dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat menciptakan *check and balances* antara seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo utamanya masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 menguraikan tentang realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu melalui LPPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama 1 (satu) Tahun Anggaran, yakni Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data yang ada maka secara signifikan terjadi perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana publik, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo senantiasa berupaya semaksimal mungkin melaksanakan semua program pemerintah yang mendukung terwujudnya cita-cita konstitusi Republik Indonesia yakni kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, dan melalui LPPD ini kiranya hasil capaian kinerja ditahun 2022 mendapatkan apresiasi dalam kerangka evaluasi untuk mengkonstruksi pembangunan yang lebih baik ditahun-tahun mendatang sekaligus menjadi *benchmarking* bagi pelaksanaan ke tata pemerintahan yang baik

Semoga Allah SWT senantiasa memberkati usaha dan pengabdian dalam melanjutkan pembangunan bagi daerah tercinta Provinsi Gorontalo, Amin..

Gorontalo, Januari 2023
Kepala Dinas Kumperindag



RISJON SUNGE
NIP. 196909241989021001

